



# 2015 Pemkab Sintang Prioritas Legalisasi Aset

Dari 886 Persil, 254 Sudah Sertifikat

SINTANG. Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang berkomitmen untuk memprioritaskan penuntasan legalisasi asset daerah. Untuk mempermudah proses legalisasi, maka Pemkab Sintang akan membentuk tim gabungan yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

"Salah satu tuntutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah asset. Karena itu, tahun depan, persoalan asset akan mendapat prioritas untuk kita selesaikan. Kita akan membentuk tim gabungan kecuali bersama dengan pihak BPN Sintang," terang Bupati Sintang Drs Milton Crosby M Si saat menerima perwakilan sertifikat dan BPN Sintang, di rumah jabatannya, Jum'at (22/8).

Pada kesempatan itu, diserahkan 13 persil sertifikat dari BPN Sintang kepada Pemkab Sintang. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala BPN Sintang Syamsuria kepada Milton Crosby.

Milton menambahkan, total asset tanah yang dimiliki Pemkab Sintang saat ini sebanyak 886 persil, dan tersebar di seluruh kecamatan. Menurutnya asset tersebut berupa lahan sekolah, lahan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Jahan Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes), serta lahan kantor pemrintahan baik di kecamatan maupun di desa.

Dari 886 persil, 254 di antaranya sudah menjadi sertifikat. 478 persil masih dalam proses legalisasi di BPN, dan 164 berbentuk Surat Keterangan Tanah (SKT).

Milton menilai, dari hasil legalisasi yang sudah menjadi sertifikat, tergolong cukup tinggi. Karena memang, lanjut dia, proses melegalkasikan asset tidak mudah. Salah satu kendala adalah minimnya juru ukur di BPN. Tenaga juru ukur ini tidak bisa asal-asalan, harus memenuhi syarat, yakni sudah sertifikasi.

"Keterbatasan juri ukur

inilah yang membuat proses legalisasi tidak bisa berjalan



Penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Syamsuria kepada Milton. Sumber: Milton

Pemkab Sintang selama ini. Memang, selama saya menjabat di BPN Sintang, belum semua asset Pemkab Sintang yang kami proses menjadi sertifikat. Masih ada beberapa yang masih dalam proses. Saya harapkan kepada pimpinan yang baru untuk dapat menyelesaikannya," ungkap Syamsuria.

Sementara Kepala BPN Sintang yang baru, Jamalludin mengaku komitmen untuk menyelesaikan sejumlah pengajuan legalisasi asset dari Pemkab Sintang. "Tentunya, saya akan melanjutkan program pejabat yang lama. Legalisasi asset akan kita prioritaskan," tegasnya.

Jamalludin mengatakan, legalisasi asset pemerintah kabupaten merupakan salah satu tugas prioritas dari kantor wilayah. Karena itu, ia akan berusaha meningkatkan koordinasi antara BPN Sintang dengan Pemkab Sintang. Kepala BPN Sintang Syamsuria menyatakan sudah menyerahkan semua penanganan legalisasi asset Pemkab Sintang kepada Jamalludin selaku pimpinan BPN Sintang yang baru. Ia mengaku bangga bisa bertugas di Sintang, karena bisa menjalin kerja sama yang baik dengan